

SOEKARNO DAN PEMIKIRANNYA TENTANG AGAMA, POLITIK, DAN PENDIDIKAN ISLAM

Muh. Mawangir
muhammadmawangir@yahoo.com

Abstract: Soekarno is better known not as an expert on religion and education, but as a political figure and leaders of this nation. However, that does not mean Soekarno did not have the concept of religion and education. Based on literature data searches by the author, the author encountered a number of ideas or thoughts Soekarno who come into contact with the area of religion and education are sourced from Soekarno views about Islam. In some writings, Sukarno many calls and identify the various problems faced by the Islamic world, especially with regard to cultural issues, low intellect and political phenomenon in various parts of the Islamic world. But Sukarno always believed, that if Muslims would be modern and upgraded, then Islam is no longer a religion in the sense of mere ritual, but Islam will be transformed into the power of transformation and change. Religion, politics and education according to Sukarno became the top priority to be implemented because it is in fact a decisive factor for the development of Muslims in Indonesia. Islam, which is believed to be the most perfect religion, place education as a very important aspect which requires his people. There is no other way to fix the slump Muslims besides preparing an education system which is rooted in the values, principles, objectives and political religion of Islam. The Soekarno thinking about religion that he conducted a series of efforts to release Muslims from its association to the interpretation or opinion among the scholars past and awaken Muslims to freedom to deal directly with the Qur'an and hadith through intellectual work. As well as provide space for the people to give rights to all of them to govern and regulate the way in solving the problems of Islamic education in Indonesia through The politically. Soekarno thought of religion, politics and Islamic education is always oriented towards the progress. "Islam is Progress" is the key word into the background and also the power of thought displayed by Sukarno. Thus, the authors can not say that Sukarno thought about religion, politics and education, today no one is against the spirit of the times. This shows that what is delivered by Soekarno it does have a view far into the future, and this of course can only be done by someone who does have a way of thinking that has been cooked.

Key Words: *Soekarno, Thought, Religious, Political, Religious Studies*

Abstrak: Soekarno memang lebih dikenal bukan sebagai pakar agama dan pendidikan, melainkan sebagai tokoh politik dan pemimpin bangsa ini. Namun demikian itu bukan berarti Soekarno tidak memiliki konsep agama dan pendidikan. Berdasarkan penelusuran data kepustakaan yang penulis lakukan, penulis menjumpai sejumlah gagasan atau pemikiran Soekarno yang bersentuhan dengan bidang agama dan pendidikan yang bersumber dari pandangan Soekarno tentang Islam. Dalam sejumlah tulisannya, Soekarno banyak menyebut dan mengidentifikasi berbagai problem yang dihadapi oleh dunia Islam, terutama yang berkaitan dengan persoalan kebudayaan, intelektualitas yang rendah dan berbagai fenomena politik di belahan dunia Islam. Tapi Soekarno selalu yakin, bahwa jika umat Islam mau menjadi modern dan melakukan pembaruan, maka Islam bukan lagi

agama dalam pengertian ritual belaka, tapi Islam akan menjelma menjadi kekuatan transformasi dan perubahan. Agama, politik dan pendidikan menurut Soekarno menjadi prioritas utama untuk dilaksanakan karena pada kenyataannya merupakan faktor penentu bagi perkembangan umat Islam di Indonesia. Islam, yang diyakini sebagai agama paling sempurna, menempatkan pendidikan sebagai aspek sangat penting yang mewajibkan umatnya. Tidak ada jalan lain untuk memperbaiki keterpurukan umat Islam selain menyusun sistem pendidikan yang berakar pada nilai-nilai, prinsip-prinsip, tujuan-tujuan agama dan politik Islam. Adapun pemikiran Soekarno tentang agama bahwa ia melakukan serangkaian usaha untuk melepaskan umat Islam dari keterkaitannya pada penafsiran atau pendapat ulama terdahulu dan menyadarkan umat Islam akan kebebasannya untuk berhubungan langsung dengan al-Qur'an dan hadits lewat kerja intelektual. Serta memberi ruang terhadap rakyat untuk memberikan hak kepada semuanya untuk ikut memerintah dan mengatur jalannya pendidikan Islam dalam memecahkan permasalahan di Indonesia melalui politik yang dianut. Pemikiran Soekarno terhadap agama, politik dan pendidikan Islam memang selalu berorientasi pada kemajuan. "*Islam is Progress*" adalah kata kunci yang menjadi latar belakang dan sekaligus kekuatan pemikiran yang ditampilkan oleh Soekarno. Dengan demikian, dapat penulis katakan, bahwa pemikiran Soekarno tentang agama, politik dan pendidikan, saat ini tidak ada satupun yang bertentangan dengan semangat zaman. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan Soekarno itu memang memiliki pandangan yang jauh ke depan, dan hal ini tentu hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang memang memiliki cara berpikir yang sudah matang.

Key Words: *Soekarno, Pemikiran, Agama, Politik, Pendidikan Islam*

Pendahuluan

Soekarno adalah presiden pertama Republik Indonesia (Nasution; 1992: 864), ia memiliki pribadi yang beraneka ragam (Onghokham; 1977: 3). Gagasan besarnya yang tidak jarang memicu kontroversi, namun tetap mengundang kekaguman. Menurut Soekarno, tidak ada agama yang lebih rasional dan simplistik ketimbang Islam (Soekarno; 1964: 355). Baginya, Islam itu rasional, yang pada gilirannya membawanya untuk bergabung di dalam Muhammadiyah, suatu organisasi sosial-keagamaan Islam modernis dan rasional.

Pandangan Soekarno mengenai politik bahwa sikap nasionalisme tidak akan terbentuk jika tidak ada sikap gotong-royong yang baik. Konsep gotong royong ini yang akan memberikan pengaruh positif dalam menimbulkan nasionalisme tersebut, sebab ketika konsep ini menjadi sebuah sistem dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia, maka konsep ini akan menjadi kuat dan membentuk nasionalisme.

Soekarno juga sangat memperhatikan pendidikan, sebab pendidikan dapat digunakan sebagai sarana transformasi masyarakat. Ia pun melontarkan kritik terhadap pendidikan Islam dalam bentuk pesantren, suatu lembaga pendidikan umat Islam saat itu, nampak kolot dan tidak sesuai dengan kemajuan zaman, lantaran ia hanya terpaku pada sistem pengajaran yang terkesan memisahkan antara aspek keagamaan dengan ilmu pengetahuan umum. Artinya, Soekarno menghendaki pendidikan Islam yang dipadu (Soekarno; 1964: 355).

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji pemikiran Soekarno dalam bidang agama, politik dan pendidikan Islam. Menurut penulis, sejauh ini kajian tentang pemikiran Soekarno memang telah banyak dilakukan, tetapi lebih terfokus pada aspek pemikiran politik Soekarno. Sementara dalam bidang pendidikan, khususnya agama dan pendidikan Islam, belum

banyak dilakukan penelitian. Dalam konteks inilah kajian tentang pemikiran Soekarno dalam bidang agama, politik dan pendidikan Islam menarik untuk dilakukan.

Agama, Politik dan Pendidikan Islam

Dalam pandangan Soekarno, Islam merupakan suatu agama yang berkembang pesat di masyarakat Indonesia. Ia memanfaatkan Islam dalam rangka memacu suatu perubahan (Soyomukti; 2008: 209). Baginya, *Islam is progress*, Islam itu kemajuan. Progres berarti barang baru, barang baru yang lebih sempurna, lebih tinggi tingkatannya dari pada barang yang terdahulu. Progres berarti pemikiran baru, *creation* baru, bukan mengurangi barang yang terdahulu, bukan mengcopy barang yang lama (Soekarno; 1964: 340). Islam itu penuh semangat dan tenaga, sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Oleh sebab itulah, Soekarno menanamkan Islam itu dengan dinamis. Dengan demikian, Islam cepat berkembang apalagi di Indonesia yang mayoritas rakyatnya beragama Islam. Ini menandakan bahwa Islam itu sesuai dengan fitrah manusia.

Soekarno tertarik dengan Islam setelah membaca buku-buku Islam modern dan ilmiah, yang bisa diterima oleh akal. Jika Islam disebarkan dengan cara ilmiah, menurut Soekarno, seluruh dunia akan mengakui kebenaran Islam. Dengan cara takhayul dan jumud maka banyak kaum intelektual Indonesia yang melindungi Islam (Hering; 2003: 274). Sedangkan Islam modern mengajak umatnya untuk bersikap dan berfikir dengan cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Islam kalau disebarkan secara ilmu pengetahuan, maka seluruh umat manusia akan tertarik dengan Islam. Tetapi sebaliknya kalau Islam disebarluaskan dengan cara tidak masuk akal, maka banyak kaum cendekiawan yang menjauhi Islam.

Soekarno berpendapat bahwa Islam adalah kemajuan, yang mempunyai makna tersendiri dalam pemikiran keislamannya. Soekarno memegang prinsip bahwa kemajuan peradaban umat manusia bukan saja sesuai dengan Islam, tetapi lebih jauh lagi yaitu Islam itu sendiri berarti kemajuan. Karena itu kemajuan identik dengan Islam dan kemajuan tidak mungkin bertentangan dengan Islam. Pendapat yang agak bernada apologi ini, sesungguhnya dapat dipahami apabila diingat betapa seriusnya kritikan yang ditujukan kepada umat Islam yang terkesan menyamakan Islam dengan kebodohan, kemunduran, dan sebagainya. Kritikan inilah juga berkembang di Indonesia dan itulah yang ingin dijawab Soekarno. Oleh karena yang dihadapinya adalah kelompok intelektual hasil didikan pola Barat, maka tidak mengherankan kalau cara yang dipakainya sangat menekankan peranan akal pikiran (Lubis; 2010: 155).

Selanjutnya, Soekarno dalam pemikirannya tentang politik dapat dilihat ketika ia menuangkan gagasan yang sangat cemerlang tentang konsep kapitalisme yang terbentuk dari pribadi sendiri. Kapitalisme adalah *stelsel* pergaulan hidup yang timbul dengan cara produksi yang memisahkan kaum buruh dari alat-alat produksi. Dengan begitu, kapitalisme terjadi atas dasar perbedaan antara kaum buruh dengan kaum pemilik modal yang terpisahkan dengan alat-alat produksi. Kapitalisme memang timbul dari cara produksi yang mengakibatkan banyak sekali penindasan terhadap kaum buruh, sehingga dalam pandangan ini Soekarno sangat menentang dengan keras faham seperti ini, apalagi jika faham ini berada di Indonesia. Kapitalisme dapat melahirkan imperialisme modern yang bisa mencelakakan bangsa. Upaya yang harus dilakukan adalah dengan cara peningkatan nasionalisme di segala aspek kehidupan.

Dalam buku *Di Bawah Bendera Revolusi* pun, Soekarno menerangkan mengenai demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Dalam pandangannya, demokrasi adalah pemerintahan rakyat, yaitu suatu cara pemerintahan ini memberikan hak kepada semua rakyat untuk ikut memerintah (Soekarno, 1964: 171). Sesuai dengan apa yang Soekarno lakukan bahwa Indonesia harus “berdikari”, yaitu berdiri di kaki sendiri, maka dengan cara pemerintahan ini sekarang menjadi cita-cita semua partai-partai nasionalis di Indonesia.

Menurut Soekarno, demokrasi yang diterapkan di Barat itu sarat dengan tipu daya kaum kapitalis dan borjuis dalam menindas kaum proletar, sedang demokrasi yang bersumber dari Barat itu bukan demokrasi yang adil karena kaum proletar belum mendapatkan kesejahteraannya dengan baik. Demokrasi tersebut tidak perlu ditiru, sebab demokrasi itu bukan demokrasi untuk kaum Marhaenis Indonesia, karena demokrasi yang seperti itu hanya demokrasi parlemen saja, yakni hanya demokrasi politik, bukan demokrasi ekonomi (Soekarno, 1964: 173).

Selain agama dan politik, peran pendidikan Islam juga sangat penting. Problem yang dihadapi umat Islam terutama adalah problem yang berkaitan dengan persoalan kebudayaan, intelektualitas yang rendah. Soekarno mengungkapkan kegelisahannya perihal nasib pendidikan Islam yang bersifat normatif sehingga cukup jauh dengan realitas objektif. Meski Soekarno sendiri mengakui bahwa kesadaran normatif memang mempunyai signifikansi yang besar untuk memelihara basis teologi umat. Namun, menurut Soekarno, dalam menghadapi realitas empiris, kesadaran normatif saja belum cukup. Tampak di sini kalau Soekarno ingin menjadikan pendidikan Islam mempunyai kontribusi bahkan mampu mengendalikan realitas sosial.

Pendidikan Islam mempunyai kepentingan dan tanggung jawab mengendalikan realitas sosial karena, bagi Soekarno, ia dapat dipakai sebagai sarana transformasi bagi masyarakat muslim. Tujuan utama pendidikan adalah meningkatkan keimanan dan ketaqwaan seseorang, arena pembentukan mental spritual, dan sebagainya. Karena itu, dalam rangka perubahan menuju ke arah kemajuan, maka suatu upaya yang harus dilakukan adalah menanamkan pada peserta didik akan rasa keimanan dan ahklak sebagai dasar dalam setiap upaya transformasi (pendidikan) nilai-nilai keislamannya (Mulkhan; 1993: 213). Pendidikan perlu sebuah *open system*, dan bukannya *close system*, yang menutup dirinya, akan tetapi seharusnya membuka ruang dialog kultural dengan kehendak atau kebutuhan masyarakat. Soekarno menolak adanya model-model pembelajaran yang dokmatis dikarenakan pola itu cenderung menempatkan peserta didik sekedar sebagai objek, dan bukan sebagai subjek hidup yang patut dihargai hak-haknya, pendapatnya, dan sebagainya. Soekarno sangat mengharapkan terjadinya interaksi timbal balik yang kreatif, kritis, mengedepankan dialog, serta menjauhkan peserta didik dari kultur otoriter yang akan membuat peserta didik menjadi takut dan tertekan. Tuntunan adanya demokrasi pendidikan dewasa ini merupakan metode baru yang diyakini lebih tepat dan relevan dengan tingkat kemajuan masyarakat (Soekarno, 1964:186).

Pola-pola yang cenderung otoriter, keras, monologis, dan sejenisnya, dianggap sudah kadaluwarsa. Salah satu diskursus dalam pendidikan Islam atau pengetahuan dalam ajaran Islam adalah masalah pengelompokan antara ilmu agama dan ilmu umum. Ilmu agama adalah yang berkaitan dengan ajaran-ajaran agama, seperti Ilmu al-Qur'an, Hadits, Fiqh, Tajwid, dan lain-lain, sedangkan ilmu umum adalah yang tidak berkaitan langsung dengan ajaran-ajaran agama, atau biasanya disebut ilmu keduniaan yang memang secara historis Barat lebih maju dari kawasan dunia lainnya. Dalam pernyataannya Soekarno menyimpulkan:

“Demi Allah “*Islam Science*” bukan hanya pengetahuan al-Qur’an dan Hadits sahaja; “*Islam Science*” adalah pengetahuan al-Qur’an dan Hadits plus pengetahuan umum! Orang tidak akan memahami betul al-Qur’an dan Hadits, kalau tak berpengetahuan umum”(Soekarno, 1964: 336).

Dewasa ini, apa yang dipikirkan Soekarno sudah menjadi kelaziman dan diakui kebenarannya oleh sebagian besar umat Islam. Di hampir semua Perguruan Tinggi Islam, telah tertanam sebuah pandangan bahwa tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum (sekuler). Berkaitan dengan hubungan antara keilmuan agama dan keilmuan umum di atas, menurut Azyumardi Azra, ada tiga tipologi, yaitu restorasionis, rekontruksionis, dan reintegrasi (Azyumardi Azra, 2005: 206-211). Namun, yang paling memungkinkan dalam keilmuan Islam di Perguruan Tinggi Islam, contohnya Universitas Islam Negeri (UIN) adalah rekontruksionis dan reintegrasi. Rekontruksionis telah berdialektika selama satu abad dan diakhiri dengan Islamisasi ilmu pengetahuan. Dalam sejarahnya, keilmuan umum dan agama masing-masing telah berdiri sendiri dan memiliki sumber epistemologi yang kuat.

Bagi Amin Abdullah, integrasi keilmuan memiliki kelemahan, yaitu sifat dari integrasi hanya berupa usaha peleburan dan pelumatan antara studi Islam dan umum yang kadang tidak saling akur. Karena itu, diperlukan usaha interkoneksi, yakni usaha memahami kompleksitas fenomena kehidupan yang dihadapi dan dijalani manusia, sehingga setiap bangunan keilmuan apapun, baik keilmuan agama, keilmuan sosial, humaniora maupun kealaman tidak dapat berdiri sendiri, maka dibutuhkan kerjasama, saling membutuhkan, saling koreksi antara disiplin keilmuan (<http://www.google.com>, 9 Agustus 2015).

Soekarno menyatakan bahwa guru itu pembentuk akal dan jiwa anak-anak.! (Soekarno, 1964: 612), sehingga apa yang diucapkan Soekarno sejalan dengan UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 mengacu pada Bab II pasal 2 dan 3 yang diinginkan pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Sisdiknas, 2013: 23). Dalam konteks inilah, guru diharuskan memiliki jiwa juang, memiliki semangat untuk berkorban, dan menjadi pioner bagi kemajuan masyarakat. Dalam kaitannya dengan profesionalisme guru, Soekarno menegaskan bahwa guru seyogianya harus mempunyai roh kerakyatan, kemerdekaan, dan kelaki-lakian (Soekarno, 1964: 618). Tiga roh ini harus menjadi jiwa, api keramat, dan wahyu hidup seorang guru.

Penutup

Berangkat dari elaborasi di atas dapat dipahami bahwa menurut Soekarno, agama Islam adalah agama yang sangat dinamis, sehingga jika disebarluaskan secara ilmu pengetahuan dan Islam akan mengalami kemunduran jika yang lebih disebarluaskan justru hadits yang lemah dan bukan ayat-ayat al-Qur’an yang menjadi sumber utama. Pemikirannya tentang politik tampak dengan tegas bahwa sikap nasionalisme tidak akan terbentuk jika tidak ada sikap gotong-royong yang baik. Nasionalisme harus dijalankan dengan konsep dasar peri-kemanusiaan, yaitu suatu konsep dimana harus dijalankan sosio-demokrasi, artinya untuk mengabdikan kepada kepentingan masyarakat banyak, khususnya di Indonesia, dan bukan mengabdikan kepada sekelompok kecil.

Adapun pemikiran Soekarno tentang pendidikan Islam yang mendasar adalah tentang pendekatan filosofis *platform* yang menjiwai seluruh dimensi kehidupan. Dalam konteks ini pendidikan perlu sebuah *open system*, dan bukannya *close system* yang menutup dirinya, akan tetapi seharusnya membuka ruang dialog kultural dengan kehendak atau kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Cindy, *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*, terj. Abdul Bar Salim, Jakarta: Gunung Agung, 1982
- Al-Buraey, Muhammad, *Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Rajawali Press, 1986
- Azra, Azyumardi, *Konflik Baru Antar Peradaban*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Babari, J dan Onny S. Priyono, *Pendidikan sebagai Sarana Pemberdayaan*, dalam Onny S. Priyono dan A. M. W. Pranarka, (peny), *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: CSIS, 1998
- Bahar, Safroedin dan Naumi Hudawati, (Tim Penyusun), *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998
- Bakker, Anton, *Metode-metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Bolan, B. J, *Pergumulan Islam di Indonesia*, Jakarta: Grafiti Press, 1985
- Dham, Bernhard, *Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan*, terj. Hasan Basri, Jakarta: LP3ES, 1987
- Hatta, Mohammad, *Memoir*, Jakarta: 1982
- Hutington, Samuel H, *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*, terj. M.S. Ismail, Yogyakarta: Qalam, 2000
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 1991
- Lucas, Henry S., *Sejarah Peradaban Barat Abad Pertengahan*, terj. S. Sumobroto, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993
- Madjid, Nurcholis, *Agama dan Politik dalam Islam*, Jurnal Paramadina, Volume 1 Juli-Des, 1998
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1980
- _____, *Partai Islam di Pentas Nasional*, Jakarta: Grafiti Press, 1987
- Natsir, Muhammad, *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Media Dakwah, 2001
- Noersena, Bambang, *Religi dan Religiusitas Soekarno*, Bali: Bali Djagadita Press, 2001
- Onghokham, Soekarno; *Mitos dan Realitas, Prisma*, Edisi Agustus 1977
- Panders, C.L.M. *The Life and Times of Soekarno*, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1974
- Salam, Solichin, *Bung Karno Putra Sang Fajar*, Jakarta: Gunung Agung, 1982
- _____, *Bung Karno dan Kehidupan Berfikir dalam Islam*, Jakarta: Gunung Agung, 1982
- Smith, William. A, *Conscientizacao: Tujuan Pendidikan Paulo Freire*, terj. Agung Prihantoro, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- Soekarno, *Indonesia Menggugat*, Jakarta: T.P, 1956
- _____, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jakarta: Penerbit Panitya DBR, Jilid I, 1964
- _____, *Sarinah, Kewajiban Wanita dalam Perdjjoangan Republik Indonesia*, Jakarta: Panitya Penerbit Kenangan Presiden Soekarno, 1963
- _____, *Pancasila dan Perdamaian Dunia*, Jakarta: Haji Masagung, 1985

- Stanton, Michael Charles, *Pendidikan Tinggi dalam Islam*, terj. H. Afandi, dan Hasan Basri, Jakarta: Logos, 1988
- Syamsudin, Din, *Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam*, dalam Abu Zahra (ed), *Politik Demi Tuhan*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999
- Tashadi, dkk, *Tokoh-tokoh Pemikir Paham Kebangsaan*, Jakarta: Depdikbud, 1994
- Nasution, Harun (Ketua Tim), *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992
- Yatim, Badri, *Soekarno, Islam dan Nasionalisme*, Jakarta: Inti Sarana Aksara, 1985